

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Hadjon, Philipus M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, vide Paulus E. Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- _____. et.al., (Ed.) *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Nasution, Darmin, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004.

Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975.

Sutedi, Adrian, *Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2013.

Jurnal:

Amina, Zaidatul, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012.

Indrawati, *Keabsahan Wewenang Seorang Aparat dalam Menciptakan Produk Hukum dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal, t.t.

_____. *Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance*, Jurnal, Perspektif, Vol. XVII No. 3, September 2012.

Wiratraman, R.Herlambang Perdana, *Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia-Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal, YURIDIKA Vol. 20 No. 1, Januari 2005

Shihab, Ahmad Nizar, *Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal, Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, Juli 2012.

Sitompul, Zulkarnain, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal, Legislasi Indonesia Vol.9 No.3, Oktober 2012.

Soekarwo, *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Jurnal, Dialogue, Vol. 1, No.2, Mei 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66).

Naskah Akademik:

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jakarta, 2010.

Risalah Sidang:

Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 8 Oktober 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 28 Oktober 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 12 November 2014.

Internet:

Ady, *OJK Dinilai Tak Layak Kenakan Pungutan Kepada BPJS*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531aecd097129/ojk-dinilai-tak-layak-kenakan-pungutan-kepada-bpjs>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.00.

Aliyudin Sofyan, *Pungutan Perdana OJK Terkumpul Rp379,9 M*, <http://m.jurnas.com/news/139159/Pungutan-Perdana-OJK-Terkumpul->

Rp3799-M--2014/1/Ekonomi/Ekonomi/, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 18.00.

Ferry N, *OJK Dapat Kenakan Pungutan BPJS*, <http://www.laraspostonline.com/2014/03/ojk-dapat-kenakan-pungutan-bpjs.html>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.00.

Heru Budhiarto, *Bahaya OJK Intervensi ke BPJS*, <http://m.plasadana.com/view.php?id=6881>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.10.

Silas Dutu, *Akibat Hukum Pungutan OJK*, <http://malutpost.co.id/2014/04/11/akibat-hukum-pungutan-ojk/>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2014, jam 13.45.

Totok Soeprijanto, *Sumber-Sumber Kewenangan*, http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638_Sumber%20Kewenangan.pdf, dikunjungi pada tanggal 23 September 2014, jam 12.20.

Tri, *BPJS Seharusnya Tidak Dikenai Pungutan OJK*, <http://poskotanews.com/2014/02/25/bpjs-seharusnya-tidak-dikenai-pungutan-ojk/>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.00.

<http://bpjs-kesehatan.go.id/>.

<http://ojk.go.id/>.